



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 21**

**Tahun : 2012**

**Seri : E**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH MENUJU  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul telah mencanangkan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak sehingga perlu disusun Pedoman Pelaksanaannya;
  - b. bahwa untuk memperjelas pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Gunungkidul Layak Anak dengan pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak yang mesinergikan seluruh sumber daya dan mitra potensial sehingga lebih efektif dan efisien;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Menuju Kabupaten Gunungkidul Layak Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten /Kota Layak Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH MENUJU KABUPATEN GUNUNGKIDUL LAYAK ANAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
6. Kabupaten adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia setelah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Bupati, dan dalam konteks Peraturan ini Kabupaten adalah pembagian wilayah administrasi dan geografi termasuk kecamatan, kelurahan/desa, kawasan tertentu, rumah tangga dan keluarga.
7. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

9. Rencana Aksi Daerah Menuju Kabupaten Gunungkidul Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh SKPD, DPRD, Lembaga/Instansi Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
10. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kabupaten layak anak.
11. Gugus Tugas KLA Kabupaten Gunungkidul adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

#### Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Menuju Kabupaten Gunungkidul Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD KLA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Gambaran Umum;
- BAB II : Pemenuhan Indikator KLA Tahun 2011;
- BAB IV : Analisis Situasi;
- BAB V : Rencana Aksi Daerah Menuju Kabupaten Gunungkidul Layak Anak;
- BAB VI : Penutup.

#### Pasal 4

RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai dokumen perencanaan memuat langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pemenuhan hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul.

#### Pasal 5

RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan mitra dalam penyusunan rencana kerja pemenuhan hak anak di Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 16 Agustus 2012

BUPATI GUNUNGKIDUL,  
ttd  
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 16 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,  
ttd  
BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2012 NOMOR 21 SERI E.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 33 TAHUN 2012  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH MENUJU  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL LAYAK ANAK

RENCANA AKSI DAERAH MENUJU  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL LAYAK ANAK

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis untuk menjamin eksistensi bangsa dan Negara dimasa depan.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan wujud dan keinginan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk anak. Kebijakan ini kemudian dipertegas juga dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak, diantaranya adalah hak atas identitas, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan dan hak atas kesehatan.

Komitmen untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak dan perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia sudah semestinya dimiliki semua pihak, baik Pemerintah Daerah (eksekutif), anggota DPRD (legislatif), para penegak hukum (yudikatif), masyarakat Gunungkidul, organisasi/forum/kelompok peduli anak, lembaga masyarakat peduli anak maupun dunia usaha.

Hak-hak itu antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia khususnya anak Gunungkidul yang makmur, sejahtera, berkualitas, dan terlindungi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyusun “Rencana Aksi Daerah” sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam pemenuhan hak-hak anak dan memberikan perlindungan anak serta kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosialnya dan berakhlak mulia.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud :

Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan semua pihak yang terkait, untuk pemenuhan Indikator menuju Kabupaten Layak Anak, dalam kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi.

### 2. Tujuan :

- a. Memberikan jaminan pemenuhan hak-hak anak.
- b. Memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Memberikan kesejahteraan kepada anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal.
- d. Menetapkan dan mencapai target yang harus dipenuhi anggota Gugus Tugas KLA sesuai dengan bidang ketugasan masing-masing.

## C. Dasar Hukum

Dasar hukum RAD KLA adalah:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

#### D. Prinsip Dasar

RAD KLA disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :

1. non diskriminasi;
2. kepentingan terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
4. penghargaan bagi pendapat anak.

#### E. Strategi

Rencana Aksi Daerah menuju KLA mengacu pada pendekatan secara terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkesinambungan, dengan strategi sebagai berikut :

1. meningkatkan komitmen kepada semua pihak terutama penentu kebijakan tentang perlunya pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, mewujudkan kesejahteraan anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta demi kepentingan terbaik anak.
2. mengarusutamakan hak-hak anak kedalam kebijakan lintas sektor terkait.
3. meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar jaringan kerja yang tergabung dalam Gugus tugas KLA agar pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak dapat terintegrasi.
4. memonitor dan mengevaluasi hasil kerja masing-masing anggota Gugus Tugas KLA agar dapat lebih terjamin keberlanjutannya.
5. membangun kemitraan dan memperluas aliansi untuk anak, dengan membangkitkan kesadaran publik untuk memenuhi hak-hak anak.

#### F. Sasaran

Sasaran RAD KLA adalah:

1. Keluarga dan Anak;
2. Lembaga Eksekutif;
3. Lembaga Legislatif;
4. Lembaga Yudikatif;
5. Organisasi non Pemerintah;
6. Dunia Usaha; dan
7. Masyarakat.

## G. Indikator

Indikator RAD KLA adalah:

1. adanya Peraturan Bupati tentang RAD menuju KLA;
2. terintegrasikannya tujuan KLA kedalam Dokumen Perencanaan pembangunan agar berkelanjutan;
3. adanya peningkatan tanggung jawab semua pihak dalam memenuhi hak-hak anak untuk pencapaian target menuju KLA;
4. adanya peningkatan koordinasi, kerjasama dan konsistensi pelaksanaan program kegiatan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, perwujudan kesejahteraan anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta demi kepentingan terbaik anak;
5. adanya peningkatan kesejahteraan anak baik secara fisik, mental, sosial maupun akhlak yang mulia, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak.

## BAB II GAMBARAN UMUM

Kabupaten Gunungkidul secara geografis merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi DIY dengan luas wilayah 1.485,36 km<sup>2</sup>, atau sekitar 46,63 persen dari luas wilayah Provinsi DIY. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul 675.382 jiwa yang tersebar di 18 kecamatan dan 144 desa atau kepadatan penduduk rata-rata 455 jiwa/km<sup>2</sup>.

Dilihat dari data jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2010, jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin di tiap-tiap kecamatan berbeda, namun data menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuannya selalu lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Adapun data tersebut dapat dilihat secara keseluruhan per kecamatan se Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini. Banyaknya penduduk tahun 2010 menurut jenis kelamin di Kabupaten Gunungkidul, adalah sebagai berikut:

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
1	2	3	4
1. Panggang	12.725	13.784	92,32
2. Purwosari	9.267	10.094	91,81
3. Paliyan	13.972	15.111	92,46
4. Saptosari	16.528	17.742	93,16
5. Tepus	15.220	16.669	91,31
6. Tanjungsari	12.371	13.327	92,83
7. Rongkop	12.976	13.925	93,18
8. Girisubo	10.544	11.644	90,55
9. Semanu	24.944	26.793	93,10
10. Ponjong	24.100	25.703	93,76
11. Karangmojo	23.520	25.248	93,16
12. Wonosari	38.527	40.220	95,79
13. Playen	26.358	28.134	93,69

1	2	3	4
14. Patuk	14.810	15.526	95,39
15. Gedangsari	17.285	17.980	96,13
16. Nglipar	14.408	15.279	94,30
17. Ngawen	15.404	16.218	94,98
18. Semin	23.744	25.282	93,92
Total	326.703	348.679	93,70

Sumber: BPS, Sensus Penduduk 2010

Jumlah penduduk usia muda (umur 15-59 tahun) tahun 2010 di Kabupaten Gunungkidul lebih banyak daripada jumlah penduduk berusia tua, dengan persentase 59,86 %.

Banyaknya penduduk tahun 2010 menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

Kelompok Umur	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah	(%)
0 – 4	23.993	22.346	46.339	6,86
5 – 9	24.580	23.310	47.900	7,09
10 – 14	27.583	25.677	53.260	7,89
15 – 19	24.683	22.828	47.511	7,03
20 – 24	16.432	17.504	33.936	5,02
25 – 29	20.539	22.153	42.692	6,32
30 – 34	21.906	22.883	44.789	6,63
35 – 39	23.552	25.786	49.338	7,31
40 – 44	25.203	27.666	52.869	7,83
45 – 49	22.550	25.562	48.112	7,12
50 – 54	21.473	24.257	45.730	6,77
55 – 59	19.701	19.706	39.407	5,83
60 +	39.742	51.066	90.808	13,45
Jumlah Total	326,703	348.679	675.382	100,00

Sumber: BPS, Sensus Penduduk 2010

Persentase Penduduk perempuan pernah kawin usia 10 tahun keatas menurut usia perkawinan pertama, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 dan 2010 adalah sebagai berikut

Usia Perkawinan Pertama	Persentase	
	Tahun 2009	Tahun 2010
≤ 16 tahun	15,40	16,24
17 – 18 tahun	27,40	23,99
19 – 24 tahun	47,93	47,17
25 tahun atau lebih	9,27	12,60
Jumlah Total	100,00	100,00

Sumber: BPS, SUSENAS, 2009, 2010

Dari tabel diatas memperlihatkan ada peningkatan usia perkawinan pertama penduduk perempuan usia 10 tahun keatas, yaitu pada usia dibawah 26 tahun dan 25 tahun.

Persentase penduduk usia 10 tahun keatas menurut angka partisipasi sekolah dan jenis kelamin yang tidak bersekolah lagi sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini angkanya cukup tinggi.

Persentase Penduduk usia 10 tahun keatas menurut angka partisipasi sekolah dan jenis kelamin di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 dan 2010 adalah sebagai berikut:

Partisipasi Sekolah	Tahun 2009			Tahun 2010		
	Lk	Prp	Lk+Prp	Lk	Prp	Lk+Prp
Tidak/Blm Pernah Sekolah	11,03	28,52	20,29	8,58	23,75	16,66
Masih Sekolah	15,74	11,71	13,61	15,06	12,90	13,91
Tidak Bersekolah Lagi	73,23	59,77	66,10	76,36	63,35	69,43
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Gunungkidul BPS, SUSENAS, 2009, 2010

Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Gunungkidul untuk menyekolahkan anak perempuannya hingga jenjang pendidikan menengah sudah meningkat, bahkan pada tahun 2009 perempuan usia 13-15 tahun yang masih sekolah lebih tinggi dan pada tahun 2010 perempuan usia 13-18 tahun yang masih sekolah juga lebih tinggi daripada laki-laki.

Angka partisipasi sekolah menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009, 2010 adalah sebagai berikut:

Tahun	Jenis kelamin	Kelompok Umur		
		7 – 12	13 - 15	16 – 18
2009	Laki-laki	99,13	90,39	61,15
	Perempuan	99,03	91,67	57,00
2010	Laki-laki	99,10	90,35	56,58
	Perempuan	98,97	92,92	64,39

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Gunungkidul BPS, SUSENAS, 2009, 2010

BAB III  
PEMENUHAN INDIKATOR KLA TAHUN 2011

A. Peraturan Daerah Dan Peraturan/Kebijakan Tentang Hak Anak

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Berakohol di Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 03 Seri E);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 07 Seri C);
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008-2013;
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009-2013;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2009 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pengobatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Gunungkidul;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008-2013;

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Pasal 1 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan dan Pencatatan Kelahiran;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2011 tentang Jasa Pelayanan kesehatan persalinan (Jampersal) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 29 Tahun 2011 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Anak yang Lahir Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pengembangan Desa Siaga di Kabupaten Gunungkidul;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 86 Tahun 2011 tentang Penandatanganan Dokumen Kependudukan dan Akte Catatan Sipil;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) di Kabupaten Gunungkidul;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Badan Narkotika Kabupaten Gunungkidul;
19. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 51/KPTS/2006 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2006;
20. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 29/KPTS/2007 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 139/KPTS/2006 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini Kabupaten Gunungkidul;
21. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 30/KPTS/2007 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 140/KPTS/2006 tentang Pembentukan Komite Koordinasi Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini Kabupaten Gunungkidul;
22. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 33/KPTS/2007 tentang Pembentukan Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul;

23. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 107/KPTS/2007 tentang Penetapan Lokasi Program Pendidikan dan pengembangan Anak Usia Dini di Kabupaten Gunungkidul;
24. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 82/KPTS/2008 tentang Pembentukan Forum Kabupaten Gunungkidul Sehat;
25. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 121/KPTS/2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul.
26. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 19/KPTS/2009 tentang Penunjukan Penanggungjawab Fasilitas Stimulasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009;
27. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 28/KPTS/2009 tentang Pembentukan Koordinasi Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009;
28. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 29/KPTS/2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009;
29. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 87/KPTS/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 33/KPTS/2007 tentang Pembentukan Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul;
30. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 174/KPTS/2009 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini Tahap III Kabupaten Gunungkidul;
31. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 18/KPTS/2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010;
32. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 20/KPTS/2010 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Aids Kabupaten Gunungkidul;
33. Keputusan Bupati Nomor 85/KPTS/2011 tentang Peningkatan Keanggotaan dan Sekretariat Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul;
34. Keputusan Bupati Nomor 172/KPTS/2011 tentang Penetapan Jenis Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kabupaten Gunungkidul;

35. Keputusan Bupati Nomor 243/KPTS/2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Gunungkidul;
36. Keputusan Bupati Nomor 45/KPTS/2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Berjejaring (P2TP2A Berjejaring) Kabupaten Gunungkidul;
37. Keputusan Bupati Nomor 180/KPTS/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Kabupaten Gunungkidul;
38. Keputusan Bupati Nomor 187/KPTS/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Kecil Menanam Dewasa Menganan.

#### B. Dukungan Anggaran Pemenuhan Hak Anak

NO	JENIS PROGRAM/KEGIATAN	PELAKSANA SKPD/LEMBAGA	JUMLAH ANGGARAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH ANGGARAN SETAHUN SEBELUMNYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Melakukan registrasi pembimbingan klien anak.	Balai Pemasarakatan			
	Melakukan registrasi permintaan litmas anak				
	Tidak melaksanakan pembuatan litmas untuk sidang anak				
	Melakukan home visit bimbingan klien anak		Rp 1.425.000		19 anak
	Mendampingi sidang anak di Pengadilan Negeri				
	Membuat laporan perkembangan klien anak				
	Membuat pengakhiran bimbingan klien anak				
2	Festival Dalang Anak	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata			
	Sanggar Seni Budaya Kelompok Karawitan Anak		Rp 25.000.000		
	Lomba Lukis dan Mewarnai				
	Pembinaan Warung Internet				

1	2	3	4	5	6
3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan	Rp 11.775.000	Rp 15.395.000	
	Kegiatan: Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup(Pembinaan, evaluasi, dan pendampingan Sekolah Adiwiyata Tk. Nasional/ Tk. Provinsi/Tk. Kabupaten)				
4	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah			
	Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Umum Daerah				
	Belanja Surat Kabar dan Majalah		Rp240.000	Rp480.000	
	Langganan Majalah Mombi				
	Langganan Majalah Nakita		Rp336.000	Rp378.000	
	Belanja Modal pengadaan Buku/Kepustakaan				
	Belanja koleksi Non Buku/APE		Rp1.000.000		
	Lomba Bercerita dan Lomba Perpustakaan		Rp34.150.000	Rp46.849.500	
	Pemberian kado pintar		Rp6.000.000	Rp6.000.000	
	Pembentukan Perpustakaan masyarakat		Rp28.505.000	Rp17.500.000	
	Kerjasama penyelenggaraan belajar bercerita setiap hari rabu		Rp46.849.500	Rp34.150.000	
	Lomba Perpustakaan sekolah TK-SMA				
5	Semua Anak Mempunyai Akta Kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Akta kelahiran Gratis usia anak 0-60 hari				
	Bantuan biaya sidang penetapan Pengadilan Negeri bagi pemohon tidak mampu		Rp40.000.000	Rp-	

1	2	3	4	5	6
	yang terlambat mencari akta kelahiran (usia anak > 1 tahun) untuk 200 pemohon	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Bantuan biaya sidang Isbat di Pengadilan Agama bagi pasangan suami-istri yang menikah (tahun 1975-1985) untuk 300 pemohon		Rp120.000.000	Rp37.680.000	
	Upaya peningkatan cakupan registrasi dan kepemilikan akta kelahiran:				
	Kegiatan sosialisasi kepada ketua RT. Dukuh, Toma, Toga di desa.				
	Pelayanan pencatatan Sipil keliling dengan mobil UP3SK ke desa.				
6	Mengembangkan kepedulian membina keluarga sakinah di lembaga sahabat keluarga	Pimpinan Daerah Nasyi'atul Aisyiyah (PDNA)			
	Melatih/ mengasah ketrampilan advokasi sosial, pemberdayaan masyarakat, aksi sosial, dan pelayanan masyarakat.				
	Memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak khususnya dalam masalah-masalah sosial				
	Mengadakan regulasi yang mendukung pelaksanaan PAUD di Nasyi'atul Aisyiyah				
	Membangun kesadaran dan sikap anti kekerasan terhadap keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia				
	Mengembangkan model sosialisasi kesehatan reproduksi usia produktif dan remaja				
	Meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan anak dan menjadi motor penggerak penjaga perkembangan dan kesehatan bayi, balita dan anak				
7	Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik			
	Kegiatan : Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat				
	Program : Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan				

1	2	3	4	5	6
	Kegiatan : Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik			
	Program : Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)				
	Kegiatan : Penyuluhan Pencegahan Peredaran/penggunaan Minuman Keras dan Narkoba				
	Kegiatan : Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan				
	Program : Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)				
	Kegiatan : Penyuluhan Pencegahan Peredaran/penggunaan Minuman Keras dan Narkoba				
8	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari			
	Terbangunnya sarana Gedung untuk Banksal Pelayanan Anak secara Paripurna				
	Kegiatan Penambahan ruang Rawat Inap untuk Pasien Anak				
	layanan poli tumbuh kembang anak				
9	Pembangunan Zona Selamat Sekolah	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
	Pengadaan Traffic Con			Rp30.000.000	
10	Program gemar makan ikan bagi anak PAUD	Dinas Kelautan dan Perikanan			
	Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah pantai (kawasan pantai ramah anak)				
11	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Rp2.371.505.000	Rp171.460.000	
	Program Wajar Dikdas 9 tahun, Kejar Paket AB		Rp4.904.654.475	Rp5.555.193.675	
	Program pendidikan menengah dan Paket C		Rp2.188.766.750	Rp1.092.431.250	

1	2	3	4	5	6
	Program Pengembangan dan kleserasian kebijakan pemuda: kegiatan pembinaan kepemudaan, pembinaan bakat dan prestasi, pembentukan watak dan karakter	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Rp94.375.000	Rp83.070.000	
	Program peningkatan peran serta kepemudaan kegiatan pemuda pelopor, pertukaran pemuda antar provinsi		Rp479.495.000	Rp279.965.000	
	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, kegiatan pembinaan dan bantuan kepada club olahraga		Rp639.076.000	Rp440.445.000	
12	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum	Kejaksaan Negeri	Rp760.025.000		
	Kegiatan Pra Peununtutan, kegiatan penuntutan, upaya hukum dan eksekusi terhadap perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perkara yang berkaitan dengan anak				
	Kegiatan Penerangan (Penyuluhan Hukum) tentang Perkara Tindak Pidana Kekerasan terhadap perempuan dan anak				
	Mengirimkan Jaksa untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak serta ABH.				
13	Program Pendirian Kelompok Bermain, TPA, Taman Baca Al Qur'an	Pimpinan Daerah 'Aisyiyah	Rp10.000.000	Rp8.000.000	
	Program Pengembangan TK / KB percontohan		Rp10.000.000	Rp8.000.000	
	Program Mengembangkan Apresiasi Seni Budaya		Rp5.000.000	Rp4.000.000	
	Kegiatan Pendokumentasian lagu dolanan anak				
	Kegiatan Lomba dolanan anak				
	Kegiatan Lomba Kreatifitas Seni TK Aisyiyah				

1	2	3	4	5	6
	Program Penerapan Keluarga Sakinah dan Qoriyah Toyyibah (desa percontohan di bidang kesehatan)	Pimpinan Daerah 'Aisyiyah	Rp4.000.000	Rp3.000.000	
	Kegiatan Penyuluhan tentang KB dan Kesehatan Reproduksi Sehat				
	Kegiatan Penyuluhan tentang gizi				
	Kegiatan Bantuan PMT untuk Posyandu Balita dan Posyandu Lansia				
	Program Pelayanan kesehatan bagi balita, ibu dan lansia		Rp6.000.000	Rp5.000.000	
	Kegiatan kerjasama dengan PKU Muh. Wonosari menyelenggarakan pelayanan pengobatan dalam pertemuan organisasi				
	Kegiatan bantuan untuk kegiatan tumbuh kembang balita bagi anak TK ABA di (DTKB APRAS)				
	Kegiatan penyuluhan tentang kesehatan bayi, ibu hamil dan nifas.				
	Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi				
	Kegiatan Penyuluhan Kesehatan reproduksi bagi siswa SMP/MTs/SMA/SMK Muhammadiyah Gunungkidul		Rp4.000.000	Rp3.000.000	
	Program Pelayanan Sosial		Rp6.000.000	Rp5.000.000	
	Kegiatan mencarikan orangtua asuh dan beasiswa anak yatim dan tidak mampu				
	kegiatan Menyediakan tempat penampungan anak korban kelahiran tidak diinginkan				
14	Program Pembinaan Pengawasan Bidang Pertambangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Energi, dan Sumber Daya Mineral			
	Koordinasi dan Pengelolaan air bawah tanah				
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan perdagangan				
	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.		Rp30.000.000	Rp17.090.000	

1	2	3	4	5	6
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Energi, dan Sumber Daya Mineral			
	Pembinaan Organisasi pedagang kaki lima dan asongan		Rp116.164.000	Rp136.025.000	
.15	Program Penguatan Kelembagaan (pelatihan KHA bagi pendamping, kampanye, sosialisasi, dll)	SOS Children Vilages (Desa Taruna) Yogyakarta	Rp5.000.000	Rp3.000.000	
	Program Hak Sipil dan Kebebasan: fasilitasi kelompok anak,fasilitasi kegiatan partisipasi anak		Rp6.000.000	Rp4.000.000	
	Program Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (gizi, imunisasi, penanggulangan penyakit, dll)		Rp Rp5.000.000	Rp7.500.000	
	Program Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (pendidikan anak usia dini, wajib belajar 12 tahun, pengadaan,pemeliharaan fasilitas rekreasi,pengembangan kreatifitas anak, dll)		Rp Rp15.000.000	Rp Rp15.000.000	
	Program pelatihan SDM Terlatih mengenai KHA		Rp1.000.000	Rp500.000	
	pengadaan buku-buku perpustakaan		Rp1.500.000	Rp1.000.000	
	pembuatan Video Documenter Kegiatan anak		Rp2.000.000	Rp1.000.000	
	pembentukan Forum Anak Tingkat Dusun dan Desa		Rp4.500.000	Rp2.000.000	
	kegiatan partisipasi forum anak (live-in,workshop, dll)		Rp6.000.000	Rp3.000.000	
	membuka usaha ekonomi Remaja/Youth Programme		Rp7.500.000	Rp3.000.000	
	membuka usaha ekonomi keluarga sejahtera (pemenuhan pengasuhan)		Rp40.000.000	Rp15.000.000	
	pembuatan Akta Gratis		Rp1.000.000	Rp1.000.000	
	Capacity Building Volunteer (Remaja, Pendamping, Orang tua)		Rp2.000.000	Rp1.000.000	

1	2	3	4	5	6
16	Sosialisasi tentang UU No 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak Kepada Masyarakat dan sekolah	POLRES			
	Penyidikan ABH				
	Penyediaan Ruang Khusus anak dalam proses penyidikan				
	Mengadakan razia di warnet, sekolah untuk antisipasi peredaran video porno				
17	Fasilitasi dan koordinasi Gugus Tugas KLA Tugas Kabupaten Layak Anak	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana	Rp -	Rp -	
	Pembuatan Data Dasar Anak		Rp -	Rp -	
	Fasilitasi dan koordinasi Forum Anak Kabupaten Gunungkidul		Rp900.000	Rp -	
	Sosialisasi KLA kepada Dinas/Instansi/SKPD terkait		Rp3.050.000	Rp -	
	Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak ke desa dan sekolah		Rp5.465.000	Rp5.465.000	
	Pembinaan Rintisan Desa Layak Anak		Rp -	Rp -	
	Pembinaan Sanggar anak di Kabupaten Gunungkidul		Rp -	Rp -	
	Program P2WKSS		Rp37.800.000	Rp37.800.000	
	Program Gerakan Sayang Ibu		Rp5.100.000	Rp5.100.000	
	Fasilitasi dan Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang		Rp2.050.000	Rp2.050.000	
	Pendidikan Keluarga Berbasis Gender (PKBG) dan <i>Parenting</i> Berbasis Gender		Rp4.660.000	Rp -	
	Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah (PMTAS)		Rp814.340.000	Rp814.340.000	
	Pembentukan kelompok Pendukung Ibu (KP IBU) untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif		Rp28.300.000	Rp -	

1	2	3	4	5	6
	Pemilihan Duta anak melalui Konggres Anak Daerah untuk mengikuti Konggres Anak Nasional	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana			
	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) ke sekolah-sekolah				
	Melakukan advokasi partisipasi anak dalam Musrenbang Kabupaten dan sudah diikutsertakan dalam Musrenbang Kabupaten				
	Pembentukan Kelompok Sadar Gender dengan pokok bahasan UUPA, UU PKDRT, UU PPTPO				
	Pembentukan Kelompok Sadar HIV/AIDS		Rp6.680.000	Rp -	
	Penanganan korban kekerasan terhadap anak melalui jejaring FPK2PA		Rp30.000.000	Rp Rp30.000.000	
	Melakukan evaluasi pelaksanaan Kabupaten Layak Anak		Rp -	Rp -	
18	Semua anak bebas gizi buruk	Dinas Kesehatan			
	Tersedianya pojok ASI di setiap fasilitas umum		Rp -	Rp -	
	Terciptanya kawasan bebas rokok di setiap Kecamatan				
	Persentase ASI eksklusif diatas rata2 nasional				
	Semua anak mendapat imunisasi dasar lengkap				
	Upaya menurunkan angka kematian Bayi		Rp87.900.000	Rp52.750.000	
	Upaya menurunkan jumlah anak kurang gizi		Rp667.860.800	Rp690.037.000	
19	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Dinas Pekerjaan Umum	Rp 4.134.714.000	Rp1.172.470.000	
	Program Lingkungan Sehat Perumahan ( Sanitasi Lingkungan berbasis Masyarakat )		Rp1.498.062.000	Rp1.190.560.000	
20	Sosialisasi Pendidikan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	Tim Penggerak PKK Kab. Gunungkidul	Rp1.900.000		
	Penyuluhan dan Traffiking perdagangan orang, perempuan dan anak		Rp2.050.000		
	Penyuluhan program keanekaragaman pangan B3A		Rp6.000.000		

1	2	3	4	5	6
	Lomba penganekaragam makanan B3A	Tim Penggerak PKK Kab. Gunungkidul	Rp1.725.000		
	Lomba penganekaragaman masakan dari ikan		Rp475.000		
21	Festval Anak Sholeh Indonesia	Kementerian Agama	Rp22.500.000		
	Festival Santri Madrasah Diniyah		Rp18.000.000		
	Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah		Rp18.000.000		
	Musabaqah Tilawatil Quran		Rp43.000.000		
22	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Rp13.580.000	Rp20.255.000	

### C. Partisipasi Anak

1. mendorong dan melibatkan anak serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli anak untuk ikut berpartisipasi dalam musrenbang mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten;
2. mendorong anak untuk lebih peduli dengan persoalan-persoalan terkait dengan pemenuhan hak anak.

### D. Tenaga Terlatih Dibidang Anak

1. Tahun 2010, data dari POLRES :
  - a. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak : 4 orang;
  - b. Kanit Polsek : 18 orang;
  - c. Kanit Polres : 6 orang.
2. Tahun 2011, data dari Kejaksaan : 7 orang jaksa yang responsif hak anak.

### E. Data dan Informasi Terpilah Tentang Anak

1. Data Profil Pendidikan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan olah raga Kabupaten Gunungkidul.
2. Data Profil Posyandu yang dibuat oleh BPMPKB Kab. Gunungkidul.
3. Data Anak Korban Kekerasan yang dibuat oleh FPK2PA Kabupaten Gunungkidul.
4. Data Anak berkebutuhan khusus yang dibuat oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Gunungkidul.

F. Keterlibatan Lembaga Masyarakat Dalam Memenuhi Hak Anak

1. Keterlibatan masyarakat dalam Gugus Tugas KLA Kabupaten Gunungkidul;
2. Keterlibatan masyarakat dalam Anggota FPK2PA Kabupaten Gunungkidul;
3. Keterlibatan masyarakat dalam Anggota Gugus Tugas Trafficking.

G. Keterlibatan Dunia Usaha Dalam Memenuhi Hak Anak

1. Keterlibatan pelaku usaha dalam Gugus Tugas KLA Kabupaten Gunungkidul (Bank BPD Cabang Wonosari)
2. Keterlibatan pelaku usaha dalam Anggota FPK2PA Kabupaten Gunungkidul (IWAPI)
3. Keterlibatan pelaku usaha dalam Anggota Gugus Tugas Trafficking

H. Persentase Anak yang Memiliki Akta Kelahiran

Persentase anak yang memiliki akta kelahiran sampai dengan tahun 2011 adalah 74 % (tujuh puluh empat persen).

I. Aksesibilitas Anak Terhadap Informasi yang Layak

1. Perpustakaan Sekolah : 494;
2. Perpustakaan Desa : 35;
3. Perpustakaan Komunitas : 6;
4. Perpustakaan Tempat Ibadah : 7;
5. Taman Bacaan Masyarakat : 53;
6. Perpustakaan Dinas/Instansi : 8.

J. Persentase Kelompok Kegiatan Anak Sebagai Wadah Partisipasi Anak

1. Forum Anak Gunungkidul;
2. Forum Anak Desa : di Desa Kemadang, Desa Karang Tengah, Desa Wareng;
3. Sanggar Anak : 15.

K. Persentase Perkawinan Pertama Dibawah Usia 18 Tahun

Persentase Penduduk perempuan pernah kawin usia 10 tahun ke atas menurut usia perkawinan pertama, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 dan 2010, adalah sebagai berikut :

Usia Perkawinan Pertama	Persentase	
	Tahun 2009	Tahun 2010
≤ 16 tahun	15,40	16,24
17 – 18 tahun	27,40	23,99
19 – 24 tahun	47,93	47,17
25 tahun atau lebih	9,27	12,60
Jumlah Total	100,00	100,00

Sumber: BPS, SUSENAS, 2009, 2010

L. Ketersediaan Lembaga Konsultasi Keluarga Bidang Pengasuhan dan Perawatan Anak

1. Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA);
2. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A Berjejaring);
3. Bina Keluarga Balita ;
4. LK3 dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul;
5. *Peer Concelor* di SMAN 2 Wonosari, Gunungkidul.

M. Ketersediaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

LKSA mulai tahun 2010 ada di 18 Kecamatan se-Kabupaten Gunungkidul.

N. Angka Kematian Bayi

Jumlah Kematian Bayi dan Balita di Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2009 dan 2010, adalah sebagai berikut :

Tahun	JUMLAH BAYI	JML BAYI MATI	JML BALITA	JML BALITA MATI
2009	8.965	24	34.465	3
2010	5.881	63	36.279	2
2011	5684	109	34890	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul 2009, 2010, 2011

O. Revalensi Kekurangan Gizi Pada Balita

Persentase Indikator Status Gizi Balita Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010, adalah sebagai berikut:

Indikator Gizi	Tahun	
	2010	2011
Status Gizi Balita (target)		
Gizi Buruk (<1%)	0,70	0,73
Gizi Kurang (<20%)	11,16	10,4
Gizi Baik (>80%)	86,38	87,25
Gizi Lebih (<3%)	1,75	1,63
Kurang Energi Protein (KEP)		
Nyata/BGM (<1%)	0,70	0,73
Total (GK + GB= <15%)	11,86	11,12
Anemia		
Ibu Hamil (<30)	840	1238
Balita (<35)		
KEK-WUS (20)	948	1310
BBLR(<10)		

Sumber: dari Dinkes Kab. Gunungkidul Th 2010

P. Persentase ASI Eksklusif

1. Persentase tahun 2009 = 26,7 %;
2. Persentase tahun 2010 = 31,1 %.

Q. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Laktasi

1. Tahun 2010, jumlah pojok ASI = 14 (di 13 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit);
2. Tahun 2011, jumlah pojok ASI = 14 (di 13 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit).

R. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap

Persentasi imunisasi dasar lengkap pada tahun 2010 adalah 100%.

S. Jumlah Lembaga Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Mental

Jumlah Lembaga Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Mental pada tahun 2011 adalah 30 puskesmas dan 1 RSUD.

T. Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok

1. Tahun 2010 = 7 Kecamatan (Karangmojo, Patuk, Ponjong, Semanu, Wonosari, Playen, Purwosari, di dalam rumah pada waktu jagong bayi, rapat, ada Bumil dan Balitanya, tidak merokok);
2. Tahun 2011 ada 35 kawasan tanpa rokok.

U. Jumlah Anak Keluarga Miskin yang Memperoleh Akses Peningkatan Kesejahteraan

Jumlahnya pada tahun 2011 ada 2315 anak.

V. Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (0 s.d. 6 Tahun)

Angka partisipasi sekolah menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 dan 2010, adalah sebagai berikut:

Tahun	Jenis kelamin	Kelompok Umur		
		7-12	13 - 15	16 – 18
2009	Laki-laki	99,13	90,39	61,15
	Perempuan	99,03	91,67	57,00
2010	Laki-laki	99,10	90,35	56,58
	Perempuan	99,97	92,92	64,39

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Gunungkidul BPS, SUSENAS, 2009, 2010

W. Persentase Wajib Belajar 12 Tahun

Persentase Penduduk usia 10 tahun keatas menurut angka partisipasi sekolah dan jenis kelamin di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 dan 2010 adalah sebagai berikut :

Partisipasi Sekolah	Tahun 2009			Tahun 2010		
	Lk	Prp	Lk+Prp	Lk	Prp	Lk+Prp
Tidak/Blm Pernah Sekolah	11,03	28,52	20,29	8,58	23,75	16,66
Masih Sekolah	15,74	11,71	13,61	15,06	12,90	13,91
Tidak Bersekolah Lagi	73,23	59,77	66,10	76,36	63,35	69,43
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Gunungkidul BPS, SUSENAS, 2009, 2010

## X. Persentase Wajib Belajar 12 Tahun

Persentase Penduduk usia 10 tahun keatas menurut angka partisipasi sekolah dan jenis kelamin di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 dan 2010 adalah sebagai berikut :

Partisipasi Sekolah	Tahun 2009			Tahun 2010		
	Lk	Prp	Lk+Prp	Lk	Prp	Lk+Prp
Tidak/Blm Pernah Sekolah	11,03	28,52	20,29	8,58	23,75	16,66
Masih Sekolah	15,74	11,71	13,61	15,06	12,90	13,91
Tidak Bersekolah Lagi	73,23	59,77	66,10	76,36	63,35	69,43
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Gunungkidul  
BPS, SUSENAS, 2009, 2010

## Y. Angka Partisipasi Menurut APK DAN APM

Persentase Angka Partisipasi menurut APK dan APM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 dan 2011, adalah sebagai berikut :

Angka Partisipasi menurut APK

APK	Tahun 2010			Tahun 2011		
	Lk	Prp	Lk+Prp	Lk	Prp	Lk+Prp
SD	106,09	94,65	200,74	54,28	51,18	105,46
SMP	116,90	107,06	223,96	58,90	58,80	117,70
SMA	75,08	67,74	142,82	41,65	37,59	79,24
Jumlah	298,07	269,45	567,52	154,83	147,57	302,4

Angka Partisipasi menurut APM

APK	Tahun 2010			Tahun 2011		
	Lk	Prp	Lk+Prp	Lk	Prp	Lk+Prp
SD	106,09	94,65	200,74	54,28	51,18	105,46
SMP	116,90	107,06	223,96	58,90	58,80	117,70
SMA	75,08	67,74	142,82	41,65	37,59	79,24
Jumlah	298,07	269,45	567,52	154,83	147,57	302,4

Sumber: Data Pilah dan Gender BPPM Propinsi DIY

## Z. Adanya Rute Aman ke Sekolah

1. Tahun 2010 = 80 % dari jumlah sekolah di Kabupaten Gunungkidul ada Zebra Cross dan Traffic Cone;
2. Tahun 2010 = 80 % dari jumlah sekolah di Kabupaten Gunungkidul ada Zebra Cross dan Traffic Cone.

AA. Ketersediaan Fasilitas Untuk Kegiatan Kreatif dan Rekreatif di Luar Sekolah

1. Tahun 2010 :
  - a. 1 Taman Kota;
  - b. 20 sanggar seni budaya;
  - c. 5 sanggar seni tari;
  - d. 1 sanggar pedalangan.
2. Tahun 2011 :
  - a. 1 Taman Kota;
  - b. 20 sanggar seni budaya;
  - c. 5 sanggar seni tari;
  - d. 1 sanggar pedalangan.

AB. Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memperoleh Pelayanan

Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan pada tahun 2009 dan 2010 adalah sebagai berikut:

DATA KASUS DAN KORBAN DI FPK2PA KABUPATEN

JENIS KEKERASAN	TAHUN 2009				TAHUN 2010			
	P	A	L	JML	P	A	L	JML
FISIK	7	1	1	9	7	2	-	9
PSIKIS	1	3	-	4	-	-	2	2-
SEKSUAL	7	14	-	21	10	15	-	25
PENELANTARAN	-	-	-	-	4	2	-	6
TOTAL	34				42			

KETERANGAN: P = PEREMPUAN; A= ANAK; L= LAKI-LAKI  
JML= JUMLAH

AC. Persentase Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang Diselesaikan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Tahun 2010, jumlah kasus ABH adalah sebagai berikut:

1. Data dari Polres Gunungkidul = 23 anak;
2. Data dari Bidang Litmas BAPAS Wonosari = 29 anak;
3. Data dari Pengadilan Negeri Wonosari = 17 anak;
4. Data dari Kejaksaan Negeri Wonosai = 23 anak;  
(13 Pelaku, 10 saksi/korban)
5. Ada 3 kasus yg diselesaikan dengan *restorative justice* .

## BAB IV

### DATA DASAR DAN ANALISIS SITUASI

#### A. Data Dasar

Pengumpulan data dasar dimaksudkan untuk mengetahui kondisi objektif awal Kabupaten Gunungkidul sebagai dasar pertimbangan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan KLA. Pengumpulan data dasar dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

##### 1. Populasi

No	Jenis data	Jumlah	Sumber Data
1	Jumlah penduduk kabupaten/kota	675.382	Badan Pusat Statistik
2	Jumlah anak Usia 0-5 tahun	55.075	
3	Jumlah anak Usia 6-12 tahun	70.547	
4	Jumlah anak Usia 13-15 tahun	32.975	
5	Jumlah anak Usia 16-18 tahun	29.119	
6	Jumlah ibu hamil	9721	Dinas Kesehatan

##### 2. Pendidikan

No	Jenis data	Jumlah	Sumber Data
1	Anak balita – PAUD	34.545	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, BPS
2	Anak balita – Play grup	29.756	
3	Anak balita – TK	29.756	
4	Anak SD / sederajat	59.834	
5	Anak SLTP / sederajat	29.307	
6	Anak SLTA / sederajat	22.270	

##### 3. Fasilitas Pendidikan

No	Jenis data	Jumlah	Sumber Data
1	Jumlah Sekolah (KB, TK, SD,SLTP, SLTA)	1.958	Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga,
2	PMTAS (pemberian makanan tambahan anak sekolah)	45.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana

#### 4. Kesehatan

No	Jenis data	Jumlah	Sumber Data
1	Anak balita – gizi buruk	0,73%	Dinas Kesehatan
2	Kematian anak bayi (0-11 bln)	123	
3	Kematian anak balita (12-59 bln)	4	
4	Ibu Menyusui	8727	
5	Balita yang terinfeksi ISPA	57798	Dinas Kesehatan
6	Balita yang terinfeksi Diare	619	
7	Balita yang terinfeksi DBD	6	
8	Balita yang terinfeksi TBC	20	
9	Anak cacat (fisik)	775	
10	Anak cacat (mental)	358	
11	Jumlah kematian Ibu melahirkan	14	

#### 5. Fasilitas Kesehatan

No	Jenis data	Jumlah	Sumber Data
1	Rumah sakit	3	Dinas Kesehatan
2	Puskesmas PKPR	10	
3	Puskesmas Rawat Jalan	16	
4	Puskesmas Rawat inap	14	
5	Puskesmas Pembantu	110	
6	Polindes	29	
7	Pos yandu	1463	
8	Balai Pengobatan Swasta	47	
9	Dokter Praktek Swasta (Umum, Spesialis, Gigi)	156	
10	Rumah Bersalin	3	
11	Bidan Praktek Swasta	160	
12	Medis (Tenaga dokter umum dan dokter gigi)	195	
13	Tenaga para medis (perawat dan bidan)	671	
14	Paramedis non perawatan	269	
15	Sarjana Kesehatan Masyarakat (S1 dan S2)	55	
16	Dukun beranak	262	
17	Klinik bidan	124	
18	Laboratorium	2	
19	Apotik	21	
20	TOGA (Taman Obat keluarga)	111910	

#### 6. Fasilitas Umum

No	Jenis data	Jumlah	Sumber Data
1	Taman bermain	1	Dinas Pekerjaan Umum , Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kantor Pengelolaan Pasar
2	Pojok ASI	13	
3	Lapangan olah raga	1	
4	Taman Rekreasi	3	
5	Perpustakaan umum	1	
6	Pasar	1	

#### 7. Perlindungan

No	Jenis data	Jumlah	Sumber Data
1	Balita terlantar	622	Dinas Sosial Tenagakerja dan Transmigrasi, Polres & Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum, Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Balai Pemasarakatan.
3	Anak terlantar	7873	
4	Anak jalanan	54	
5	Anak korban kekerasan (seksual, fisik)	34	
6	Anak bermasalah hukum	27	
7	Anak yang bekerja (pekerja anak)	1871	
8	Anak yang belum memiliki Akte Kelahiran	50.356	

#### 8. Fasilitas Perlindungan

No	Jenis data	Jumlah	Sumber Data
1	Panti Sosial Anak Balita	0	Dinas Sosial, Tenagakerja, dan Transmigrasi
2	Panti Sosial Asuhan Anak	14	
3	Panti Sosial Bina Remaja	0	
4	Panti Asuhan	14	
5	LSM peduli anak	4	

#### 9. Akses

No	Jenis data	Jumlah	Sumber Data
1	Terhadap pengambil kebijakan	1	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana
2	Teknologi informasi dan komunikasi	1	
3	Wadah Partisipasi	1	

## B. Analisa Situasi

Dari hasil beberapa inventarisasi yang terkait dengan pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak, maka ditemukan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk ditindaklanjuti, antara lain :

1. Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan yang Lain Tentang Pemenuhan Hak Anak
  - a. Hak Sipil dan Kebebasan

Diperlukan adanya kebijakan Bupati untuk membentuk forum anak ditingkat desa dan gugus tugas desa layak anak.
  - b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Diperlukan tambahan kebijakan untuk mengurangi pernikahan usia anak (misal : syarat pertumbuhan dispensasi nikah, perlu dilengkapi dengan surat keterangan telah hamil dari tenaga medis di Puskesmas setempat).
  - c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Diperlukan adanya kebijakan yang mengatur fasilitas bagi ibu menyusui, pembatasan pemasaran produk susu formula dan makanan pengganti ASI.

Dukungan bagi ibu untuk menyusui bayinya telah diberikan program kegiatan pembentukan Kelompok Pendukung Ibu.
  - d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Diperlukan kebijakan untuk mewujudkan sekolah ramah anak, zona selamat sekolah serta fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif anak.
  - e. Perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan diadakannya pendidikan inklusi, masih perlu ditingkatkan perannya untuk dapat diakses oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus.
2. Dukungan Anggaran Pemenuhan Hak Anak
  - Perlu dianggarkan untuk menstimulasi di beberapa desa dalam rangka merintis menuju Desa Ramah Anak
  - Dalam Perencanaan penganggaran supaya didasarkan data yang akurat, isu-isu strategis dan kesenjangan yang ada.
  - Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak dan untuk penguatan kelembagaan masih perlu ditingkatkan.

3. Partisipasi Anak  
Perlu adanya kebijakan untuk mengikutkan anak.
4. Tenaga Terlatih Dibidang Anak  
Diperlukan tambahan pelatihan bagi aparat dan pendamping.
5. Data dan Informasi Terpilah Tentang Anak  
Data yang terkait 5 kluster hak anak masih perlu dilengkapi.
6. Keterlibatan Lembaga Masyarakat dalam Memenuhi Hak Anak  
Masih sangat diperlukan peran Lembaga Masyarakat untuk ikut peduli dalam pemenuhan hak anak.
7. Keterlibatan Dunia Usaha dalam Memenuhi Hak Anak  
Meski sangat terbatas, BPD Cabang Wonosari sudah peduli dalam mendukung pemenuhan hak anak. Sehingga masih perlu ditingkatkan bantuannya untuk memberikan sebagian dana *Corporate Social Responcibility* (CSR), supaya lebih bisa memenuhi hak anak di Kabupaten Gunungkidul. Peran dunia usaha selain BPD juga perlu dilibatkan dalam pemenuhan hak anak.
8. Persentase Anak yang Memiliki Akta Kelahiran  
Belum semua anak di Kabupaten Gunungkidul sudah memiliki akta kelahiran.
9. Aksesibilitas Anak dalam Memperoleh Informasi Yang Layak
10. Persentase Kelompok Kegiatan Anak sebagai Wadah Partisipasi Anak  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan keluarga Berencana serta Bappeda, sudah ada kelompok kegiatan anak sebagai wadah partisipasi anak. Namun demikian, SKPD lain dan Organisasi Masyarakat juga perlu ikut berperan meningkatkan persentase kelompok kegiatan anak sebagai wadah partisipasi anak.
11. Persentase Perkawinan Pertama Dibawah Usia 18 Tahun  
Menurut data dari Kementrian Agama Kabupaten Gunungkidul, angka perkawinan yang dibawah batas umur dalam ketentuan UU No: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan data pemohon dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Wonosari, cukup tinggi. Untuk itu, perlu upaya dari semua pihak untuk dapat menurunkan angka perkawinan usia anak (18 tahun).

12. Lembaga Konsultasi Keluarga Bidang Pengasuhan dan Perawatan Anak  
Meskipun sudah ada Lembaga Konsultasi Keluarga bidang pengasuhan dan perawatan anak, seperti LK3 dibawah Dinsosnakertran, klinik di RSUD Wonosari, P2TP2A yang Sekretariatnya di Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul, namun masih diperlukan peran organisasi perempuan dan organisasi non pemerintah untuk ikut peduli sebagai Konsultan Keluarga bidang pengasuhan dan perawatan anak.
13. Ketersediaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)  
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, seperti Panti Asuhan Budi Bakti milik Dinas Sosial Propinsi DIY di Wonosari daya tampungnya hanya untuk 60 anak, sehingga perlu dukungan panti-panti lain dari pihak swasta.
14. Angka Kematian Bayi  
Masih ada angka kematian bayi di Kabupaten Gunungkidul. Upaya-upaya yang telah dilakukan, seperti pemeriksaan Ibu Hamil di Poskesdes, Pustu maupun Puskesmas, Jampersal, pembentukan kelompok pendukung ibu yang anggotanya Ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui untuk pencapaian ASI eksklusif, dan lain-lain, sangat dirasakan penting untuk menurunkan angka kematian bayi.
15. Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita  
Meskipun Persentase gizi buruk pada Balita dibawah 1%, tetapi masih perlu upaya-upaya agar tidak ada lagi Balita gizi buruk
16. Presentase ASI Eksklusif  
Persentase pencapaian ASI eksklusif belum memenuhi target, sehingga kegiatan Kelompok Pendukung Ibu perlu diperbanyak diwilayah kabupaten Gunungkidul. Upaya lain dapat dilakukan dengan membuat MOU antara Kepala Desa dengan Bidan Desa untuk membantu memasyarakatkan ASI eksklusif.
17. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Laktasi  
Belum semua tempat pelayanan umum seperti: terminal, pasar, tempat-tempat wisata disediakan sarana prasarana laktasi berupa pojok ASI.
18. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap  
Pada kenyataannya, imunisasi dasar lengkap persentasenya sudah 100%, karena masyarakat sudah menyadari arti pentingnya pemberian imunisasi demi menjaga ketahanan tubuh anaknya. Program keluarga

harapan sebelum memberikan bantuan juga mensyaratkan sudah selesai imunisasi dasar lengkap, sehingga mendorong para orangtua untuk memenuhinya. Namun demikian, keadaan ini harus terus dipertahankan.

19. Jumlah Lembaga Pelayanan Kespro dan Mental

Disamping RSUD dan Puskesmas, termasuk Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit swastapun telah menyediakan pelayanan Kespro dan mental. Keberadaan Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) juga sangat diperlukan untuk memberikan kepedulian mengenai Kespro dan mental. Tetapi kegiatan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan terhadap Kespro dan Mental masih sangat perlu diadakan.

20. Jumlah Anak Keluarga Miskin yang Memperoleh Akses Peningkatan Kesejahteraan

Sudah ada Program kegiatan baik dari Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga maupun Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk membantu anak keluarga miskin dalam memperoleh akses peningkatan kesejahteraan. Meskipun tidak secara langsung memberikan bantuan, tetapi program kegiatan dari semua SKPD pun diperuntukkan kepada keluarga miskin yang berdampak untuk peningkatan kesejahteraan anaknya. Di Kabupaten Gunungkidul dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang beranggotakan dari berbagai SKPD. Bank Pembangunan Daerah DIY (BPD DIY) Kantor Cabang Wonosari-pun juga memberikan bea siswa bagi anak keluarga miskin yang berprestasi.

21. Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Akses Air Bersih

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) telah mengupayakan untuk memberikan pelayanan penyediaan air bersih agar dapat diakses oleh masyarakat. Bahkan di Desa Karangrejek melalui program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) secara mandiri telah menyediakan air bersih kepada warganya. Sekarang yang memanfaatkan termasuk warga desa sekitarnya, seperti Desa Siraman.

22. Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok

Belum semua Kecamatan mencanangkan kawasan tanpa rokok. Mengingat bahayanya efek dari asap rokok terhadap perokok aktif maupun pasip, maka hal ini perlu mendapat perhatian dan upaya semua pihak untuk tersedianya kawasan tanpa rokok.

23. Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (0 s.d 6 tahun)

Lembaga PAUD di Kabupaten Gunungkidul sudah ada , Taman Kanak-kanak-pun sudah ada disetiap Dusun. Yang perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya mengenai pendidikan anak usia dini adalah di daerah-daerah pelosok yang akses jangkauannya masih cukup jauh dan cukup sulit.

24. Persentase Wajib Belajar 12 Tahun

Untuk persentase wajib belajar 9 tahun sudah relative tinggi. Namun demikian setelah ditingkatkan wajib belajar menjadi 12 tahun masih sangat diperlukan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan semua pihak untuk megupayakan tercapainya wajib belajar 12 tahun dalam persentase yang tinggi.

25. Persentase Sekolah Ramah Anak

Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Gunungkidul telah mempunyai program kegiatan pembentukan Sekolah Adiwiyata, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Jumlah Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Gunungkidul ada 10 (sepuluh )Sekolah. Keadaan tersebut kalau dipersentase dengan banyaknya sekolah diseluruh wilayah Gunungkidul, masih jauh dari yang diharapkan. Untuk itu, program kegiatan pembentukan Sekolah Adiwiyata perlu terus ditingkatkan. Peran dari berbagai pihakpun sangat diperlukan dalam mewujudkan semua sekolah sudah ramah anak.

26. Adanya Rute Aman ke Sekolah

Belum semua sekolah memiliki rute aman ke sekolah. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gunungkidul sangat perlu untuk menyediakan fasilitas rute aman ke sekolah, meskipun untuk sekolah-sekolah jalur ramai tiap harinya oleh Polisi Lalu Lintas dan anak-anak sekolah yang ikut bertugas, telah membantu mengkondisikan rute aman ke sekolah setiap harinya.

27. Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Kreatif dan Rekreatif di Luar Sekolah

Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif masih sangat terbatas. Fasilitas yang tersedia antara lain baru Sanggar Kegiatan Belajar, Gedung Kesenian, Taman Pesawat.

28. Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memperoleh Pelayanan

Anak yang memerlukan perlindungan khusus sudah memperoleh pelayanan sekolah di Sekolah Luar Biasa yang ada di beberapa wilayah. Pendidikan inklusi juga dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kepada AMPK. Untuk jenis pelayanan yang lain, telah diprogramkan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Propinsi DIY.

29. Persentase Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang Diselesaikan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Belum semua ABH mendapatkan keadilan restorative. Alternatif lain selain hukuman pidana penjara sangat dibutuhkan oleh ABH demi kepentingan terbaik anak. Adanya program rehabilitasi social akan lebih mendidik secara baik dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat dari pada menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan yang bukan khusus untuk anak.

30. Persentase Anak yang Dibebaskan dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah melaksanakan kegiatan penarikan pekerja anak, untuk diberikan pilihan kembali ke sekolah atau mengikuti pelatihan yang bermanfaat. Namun masih perlu penyebaran informasi untuk tidak mempekerjakan anak.

## BAB V

### RENCANA AKSI DAERAH MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK

#### A. Program Kegiatan Tiga Tahun (2013-2015)

Rencana Aksi Daerah Menuju Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) dituangkan dalam program kegiatan yang mengacu pada indikator KLA sesuai dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten /Kota Layak Anak (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169), RAD KLA dibagi menjadi lima program sebagai berikut:

- a. Program pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
- b. Program lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. Program pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Program pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. Program perlindungan khusus.

#### B. Rincian Program dan Kegiatan 3 (Tiga) Tahun (2013-2015)

### PROGRAM KEGIATAN 3 (TIGA) TAHUN (2013-2015)

NO	JENIS PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT	KERANGKA WAKTU			PELAKSANA SKPD/LEMBAGA	SUMBER PENDANAAN	SASARAN/ TARGET GROUP	KETERANGAN
			2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga									
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terwujudnya pendidikan anak usia dini	√	√	√	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	APBD	PAUD	
2	Program Wajar Dikdas 9 tahun, Kejar Paket A,B	terwujudnya Wajar Dikdas 9 tahun, kejar paket A,B	√	√	√			Anak SD SMP	
3	Program pendidikan menengah dan Paket C	terwujudnya pendidikan menengah dan Paket C	√	√	√			Anak SMU	
4	Program Pengembangan dan kleserasian kebijakan pemuda: kegiatan pembinaan kepemudaan, pembinaan bakat dan prestasi, pembentukan watak dan karakter	terwujudnya penyuluhanPengembangan dan kleserasian kebijakan pemuda	√	√	√			Anak dan remaja	
5	Program peningkatan peran serta kepemudaan kegiatan pemuda pelopor, pertukaran pemuda antar provinsi	terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan	√	√	√			Anak dan remaja	
6	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, kegiatan pembinaan dan bantuan kepada club olahraga	terwujudnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	√	√	√			club olahraga anak	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana									
1	Fasilitasi dan koordinasi Gugus Tugas KLA Tugas Kabupaten Layak Anak	terfasilitasi dan terkoordinasinya Gugus Tugas KLA Tugas Kabupaten Layak Anak	√	√	√	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana	APBD	SKPD dan lembaga	
2	Pembuatan Data Dasar Anak	tersusunya Data Dasar Anak	√	√	√			SKPD dan Anak	
3	Fasilitasi dan koordinasi Forum Anak Kabupaten Gunungkidul	Fasilitasi dan koordinasi Forum Anak Kabupaten Gunungkidul	√	√	√			forum Anak	
4	Sosialisasi KLA kepada Dinas/Instansi/SKPD terkait	terlaksananya sosialisasi KLA kepada Dinas/Instansi/SKPD terkait	√	√	√			SKPD dan lembaga	
5	Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak ke desa dan sekolah	Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak ke desa dan sekolah	√	√	√			Anak, Masyarakat, keluarga	
6	Pembinaan Rintisan Desa Layak	Terlaksananya pembinaan Rintisan Desa Layak anak	√	√	√			Aparat desa, anak, masyarakat	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Pembinaan Sanggar anak di Kabupaten Gunungkidul	Pembinaan Sanggar anak di Kabupaten Gunungkidul	√	√	√	Badan Pernerdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana	APBD	sanggar anak	
8	Program P2WKSS	terselenggaranya Program P2WKSS	√	√	√			desa	
9	Program Gerakan Sayang Ibu	terselenggaranya Program Gerakan Sayang Ibu	√	√	√			desa	
10	Fasilitasi dan Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang	terfasilitasi dan terkoordinasinya Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang	√	√	√			gugus tugas	
11	Pendidikan Keluarga Berbasis Gender (PKBG) dan <i>Parenting</i> Berbasis Gender	terselenggaranya Pendidikan Keluarga Berbasis Gender (PKBG) dan <i>Parenting</i> Berbasis Gender	√	√	√			keluarga, orangtua	
12	Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah (PMTAS)	terselenggaranya PMTAS	√	√	√			anak	
13	Pembentukan kelompok Pendukung Ibu (KP IBU) untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif	Terbentuknya kelompok Pendukung Ibu (KP IBU)	√	√	√			ibu hamil, ibu yang mempunyai bayi dan balita	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Pemilihan Duta anak melalui Konggres Anak Daerah untuk mengikuti Konggres Anak Nasional	terpilihnya Duta anak melalui Konggres Anak Daerah untuk mengikuti Konggres Anak Nasional	√	√	√	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana	APBD	Anak	
15	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) ke sekolah-sekolah	terwujudnya sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) ke sekolah-sekolah	√	√	√			Remaja, anak	
16	Melakukan advokasi partisipasi anak dalam Musrenbang Kabupaten dan sudah diikutsertakan dalam Musrenbang Kabupaten	terselenggaranya advokasi partisipasi anak dalam Musrenbang Kabupaten dan sudah diikutsertakan dalam Musrenbang Kabupaten	√	√	√			Anak, forum anak	
17	Pembentukan Kelompok Sadar Gender dengan pokok bahasan UUPA, UU PKDRT, UU PPTPO	terbentuknya Kelompok Sadar Gender dengan pokok bahasan UUPA, UU PKDRT, UU PPTPO	√	√	√			Masyarakat	
18	Pembentukan Kelompok Sadar HIV/AIDS	terbentuknya Kelompok Sadar HIV/AIDS	√	√	√			Masyarakat	
19	Penanganan korban kekerasan terhadap anak melalui jejaring FPK2PA	terselenggaranya penanganan korban kekerasan terhadap anak melalui jejaring FPK2PA	√	√	√			perempuan dan anak korban kekerasan	
20	Melakukan evaluasi pelaksanaan Kabupaten Layak Anak	terselenggaranya evaluasi pelaksanaan Kabupaten Layak Anak	√	√	√			SKPD lembaga	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dinas Kesehatan									
1	Semua anak bebas gizi buruk	terwujudnya anak bebas gizi buruk	< 1 %	< 1 %	< 1 %	Dinas Kesehatan	APBD	Anak	
2	Tersedianya pojok ASI disetiap fasilitas umum	tersedianya pojok asi	0	0	0			anak	
3	Terciptanya kawasan bebas rokok disetiap Kecamatan	terciptanya kawasn bebas rokok di setiap kecamatan	2	3	3			anak dan masyarakat	
4	Persentase ASI eksklusif diatas rata2 nasional	terwujudnya prosentasi asi eksklusif diatas rata rata nasional	45%	50%	60%			anak dan ibu	
5	Semua anak mendapat imunisasi dasar lengkap	terwujudnya anak mendapat imunisasi dasar lengkap	100%	100%	100%			anak	
Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataa									
1	Festival Dalang Anak	terlaksananya festival dalang anak	√	√	√	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataa	APBD	anak	
2	Sanggar Seni Budaya Kelompok Karawitan Anak	terwujudnya sanggar seni	10	10	10			kelompok karawitan anak	
3	Lomba Lukis dan Mewarnai	Terwujudnya lomba	√	√	√			anak	
4	Pembinaan Warung Internet	terwujudnya pembinaan	√	√	√			pemilik warnet	
Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika									
1	pembangunan Zona Selamat Sekolah	terwujudnya zona selamat sekolah	√	√	√	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	DAK	Sekolah	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pengadaan Traffic Con	Terwujudnya traffic con	√	√	√				
Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan									
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	terwujudnya sekolah Adiwiyata	16	19	22	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan	APBD	sekolah	
	Kegiatan: Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup(Pembinaan, evaluasi, dan pendampingan Sekolah Adiwiyata Tk. Nasional/ Tk. Provinsi/Tk. Kabupaten)								
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah									
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	terwujudnya budaya baca dan pembinaan perpustakaan	√	√	√	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	APBD	perpustakaan	
2	Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Umum Daerah	tersedianya bahan pustaka	√	√	√			perpustakaan	
3	Belanja Surat Kabar dan Majalah	tersedianya surat kabar dan majalah	√	√	√			perpustakaan	
4	Langganan Majalah Mombi	terwujudnya langganan majalah	√	√	√			perpustakaan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Langganan Majalah Nakita	terwujudnya langganan majalah	√	√	√			perpustakaan	
6	Belanja Modal pengadaan Buku/Kepustakaan	terwujudnya buku/kepustakaan	√	√	√			perpustakaan	
7	Belanja koleksi Non Buku/APE	terwujudnya koleksi non buku/APE	√	√	√			perpustakaan	
8	Lomba Bercerita dan Lomba Perpustakaan	terlaksananya lomba	√	√	√			anak	
9	Pemberian kado pintar	terwujudnya pemberian kado pintar	√	√	√			anak	
10	Pembentukan Perpustakaan masyarakat	terwujudnya perpustakaan masyarakat	√	√	√			anak dan masyarakat	
11	Kerjasama penyelenggaraan belajar bercerita setiap hari rabu	terselenggaranya belajar bercerita	√	√	√			anak	
12	Lomba Perpustakaan sekolah TK-SMA	terselenggaranya lomba	√	√	√			anak	
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik									
1	Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan : Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat	terwujudnya penyuluhan nilai-nilai nasionalisme	60	60	60	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	APBD	ANAK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Program : Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan Kegiatan : Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	terwujudnya penyuluhan wawasan kebangsaan dan hak bela negara	60	60	60			ANAK	
3	Program : Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Kegiatan : Penyuluhan Pencegahan Peredaran/penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	terwujudnya pembinaan penyuluhan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)	70	70	70			ANAK	
Rumah Sakit Umum Daerah									
1	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Terwujudnya ruang rawat inap untuk pasien anak	√	√	√	Rumah Sakit Umum Daerah	APBD	Pasien Anak	
	Terbangunnya sarana Gedung untuk Banksal Pelayanan Anak secara Paripurna Kegiatan Penambahan ruang Rawat Inap untuk Pasien Anak								
2	layanan poli tumbuh kembang anak	terwujudnya layanan tumbuh kembang anak	√	√	√				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dinas Kelautan dan Perikanan									
1	Program gemar makan ikan bagi anak PAUD	terwujudnya kampanye gemar makan ikan	√	√	√	Dinas Kelautan dan Perikanan	APBD	anak PAUD	
2	Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah pantai (kawasan pantai ramah anak)	terwujudnya sosialisasi	√	√	√			Anak dan Tim SAR	
Dinas Pekerjaan Umum									
1	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	tersedianya air baku	74%	77%	80%	Dinas Pekerjaan Umum	APBD	masyarakat dan anak	
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan (Sanitasi Lingkungan berbasis Masyarakat)	terwujudnya lingkungan sehat	53%	55%	58%			masyarakat dan anak	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral									
1	Program Pembinaan Pengawasan Bidang Pertambangan	terwujudnya koordinasi dan pengelolaan air tanah	√	√	√	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral	APBD	masyarakat	
	Koordinasi dan Pengelolaan air bawah tanah		√	√	√				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan perdagangan  Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.	terwujudnya pengawasan dan perlindungan konsumen	√	√	√			masyarakat, pelaku usaha	
3	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.  Pembinaan Organisasi pedagang kaki lima dan asongan	terwujudnya pembinaan	√	√	√			masyarakat dan pelaku usaha	
Kementerian Agama									
1	Festval Anak Sholeh Indonesia	terselenggaranya festival				Kementerian Agama	APBN	anak	
2	Festival Santri Madrasah Diniyah	terselenggaranya festival						anak	
3	Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah	terselenggaranya pekan olah raga dan seni ponpes						anak	
4	Musabaqah Tilawatil Quran	terselenggaranya MTQ						anak	
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga									
1	Sosialisasi Pendidikan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	terselenggaranya sosialisasi				Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	APBD	anak	
2	Penyuluhan dan Traffiking perdagangan orang, perempuan dan anak	terselenggaranya penyuluhan						anak	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Polres Gunungkidul									
1	Sosialisasi tentang UU No 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak Kepada Masyarakat dan sekolah	terwujudnya sosialisasi	√	√	√	Polres Gunungkidul	APBN	masyarakat dan sekolah	
2	Penyidikan ABH	terselenggaranya penyidikan	√	√	√			ABH	
3	Penyediaan Ruang Khusus anak dalam proses penyidikan	terwujudnya ruangan khusus	√	√	√			Polres	
4	Mengadakan razia di warnet, sekolah untuk antisipasi peredaran video porno	terselenggaranya razia	√	√	√			masyarakat dan sekolah, pelaku usaha	
BPD DIY Kanca Wonosari									
1	Sponsor Seminar Forum anak Gunungkidul	Tersponsorinya seminar Forum Anak				BPD DIY Kanca Wonosari	Swadaya	anak	
2.	Sponsor Porseni Taman Kanak-Kanak bersama	Tersponsorinya poreseni Taman Kanak Kanak						anak	
3.	Beasiswa Pelajar tingkat SMA/SMK	Terselenggaranya beasiswa						anak	
4.	Bantuan Perpustakaan untuk SMK	Terselenggaranya bantuan perpustakaan						anak	
5.	Bantuan Perlatan Rumah Belajar	Terselenggaranya bantuan Peralatan Rumah Belajar						anak	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Sponsor peringatan Hari Kartini	Terselenggaranya sponsor peringatan Hari Kartini						Anak, perempuan dan masyarakat	
7.	Sponsor kegiatan Jumbara PMR Kab. GK	Terselenggaranya sponsor kegiatan Jumbara PMR						anak	
SOS Children Vilages (Desa Taruna) Yogyakarta									
1	Program Penguatan Kelembagaan (pelatihan KHA bagi pendamping, kampanye, sosialisasi, dll)	terwujudnya pelatihan KHA	6	6	6	SOS Children Vilages (Desa Taruna) Yogyakarta	Swadaya Lembaga	anak	
2	Program Hak Sipil dan Kebebasan: fasilitasi kelompok anak,fasilitasi kegiatan partisipasi anak	terwujudnya fasilitasi kelompok anak dan partisipasi anak	12	12	12			anak	
3	Program Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (gizi, imunisasi, penanggulangan penyakit, dll)	terwujudnya kesehatan dasar dan kesejahteraan anak	12	12	12			anak	
4	Program Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (pendidikan anak usia dini, wajib belajar 12 tahun, pengadaan,pemeliharaan fasilitas rekreasi,pengembangan kreatifitas anak, dll)	terwujudnya pendidikan, pemeliharaan fasilitas rekreasi dan pengembangan kreatifitas	12	12	12			anak	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Program pelatihan SDM Terlatih mengenai KHA	terwujudnya sdm terlatih	6	6	6			anak	
6	pengadaan buku-buku perpustakaan	terwujudnya buku	1	1	1			taman bacaan	
7	pembuatan Video Documenter Kegiatan anak	terwujudnya video	2	2	2			anak	
8	pembentukan Forum Anak Tingkat Dusun dan Desa	terbentuknya forum anak	15	15	15			anak, dusun desa, forum anak	
9	kegiatan partisipasi forum anak (live-in,workshop, dll)	terselenggaranya kegiatan partisipasi	1	1	1			anak	
10	membuka usaha ekonomi Remaja/Youth Programme	terwujudnya usaha ekonomi remaja	1	1	1			anak	
11	membuka usaha ekonomi keluarga sejahtera (pemenuhan pengasuhan)	terwujudnya usaha ekonom keluarga	1	1	1			keluarga, anak, pendamping, ortu	
12	pembuatan Akta Gratis	terwujudnya akta						anak	
13	Capacity Building Volunteer (Remaja, Pendamping, Ortu)	terwujudnya capacity building	1	1	1			remaja, pedamping, ortu	
Pimpinan Daerah 'Aisyiyah									
1	Program Pendirian Kelompok Bermain, TPA, Taman Baca Al Qur'an	terwujudnya Kelompok Bermain, TPA, Taman Baca Al Qur'an	√	√	√	Pimpinan Daerah 'Aisyiyah	Swadaya Lembaga	lembaga	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Program Pengembangan TK / KB percontohan	terwujudnya Pengembangan TK / KB percontohan	√	√	√				
3	Program Mengembangkan Apresiasi Seni Budaya	terwujudnya apresiasi seni dan budaya	√	√	√			lembaga pendidikan, anak	
	Kegiatan Pendokumentasian lagu dolanan anak		√	√	√				
	Kegiatan Lomba dolanan anak		√	√	√				
	Kegiatan Lomba Kreatifitas Seni TK Aisyiyah		√	√	√				
4	Program Penerapan Keluarga Sakinah dan Qoriyah Toyyibah (desa percontohan di bidang kesehatan)	terwujudnya penyuluhan	√	√	√			keluarga, masyarakat	
	Kegiatan Penyuluhan tentang KB dan Kesehatan Reproduksi Sehat		√	√	√				
	Kegiatan Penyuluhan tentang gizi		√	√	√				
	Kegiatan Bantuan PMT untuk Posyandu Balita dan Posyandu Lansia		√	√	√				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Program Pelayanan kesehatan bagi balita, ibu dan lansia	terwujudnya pelayanan kesehatan	√	√	√	Pimpinan Daerah 'Aisyiyah	Swadaya Lembaga	balita ibu dan lansia	
	Kegiatan kerjasama dengan PKU Muh. Wonosari menyelenggarakan pelayanan pengobatan dalam pertemuan organisasi		√	√	√				
	Kegiatan bantuan untuk kegiatan tumbuh kembang balita bagi anak TK ABA di (DTKB APRAS)		√	√	√				
	Kegiatan penyuluhan tentang kesehatan bayi, ibu hamil dan nifas.		√	√	√				
6	Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi	terwujudnya penyuluhan kespro	√	√	√			siswa smp,mts, sma , smk muhammadiyah	
	Kegiatan Penyuluhan Kesehatan reproduksi bagi siswa SMP/MTs/SMA/SMK Muhammadiyah Gunungkidul		√	√	√				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Program Pelayanan Sosial  Kegiatan mencari orang tua asuh dan beasiswa anak yatim dan tidak mampu  kegiatan Menyediakan tempat penampungan anak korban kelahiran tidak diinginkan	terwujudnya pelayanan sosial bagi anak	√	√	√			Anak yatim, anak keluarga tidak mampu, anak korban kelahiran tidak diinginkan	
Balai Pemasarakatan									
1	Melakukan registrasi pembimbingan klien anak.	Terwujudnya data klien anak yang mendapat bimbingan	√	√	√	Balai Pemasarakatan	APBN	anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan keluarga	
2	Melakukan registrasi permintaan litmas anak	Terwujudnya data permintaan litmas anak	√	√	√				
3	Tidak melaksanakan pembuatan litmas untuk sidang anak	Terwujudnya data anak yang tidak dibuatkan litmas untuk sidang	√	√	√				
4	Melakukan home visit bimbingan klien anak	terwujudnya home visit	√	√	√				
5	Mendampingi sidang anak di Pengadilan Negeri	terwujudnya pendampingan sidang	√	√	√				
6	Membuat laporan perkembangan klien anak	Terwujudnya laporan	√	√	√				
7	Membuat pengakhiran bimbingan klien anak	Terwujudnya pengakhiran bimbingan	√	√	√				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pimpinan Daerah Nasyi'atul Aisyiyah (PDNA)									
1	Mengembangkan kepedulian membina keluarga sakinah di lembaga sahabat keluarga	terwujudnya layanan bina keluarga sakinah	√	√	√	Pimpinan Daerah Nasyi'atul Aisyiyah (PDNA)	Swadaya lembaga	keluarga	
2	Melatih/ mengasah ketrampilan advokasi sosial, pemberdayaan masyarakat, aksi sosial, dan pelayanan masyarakat.	terwujudnya ketrampilan dalam melakukan advokasi sosial, pemberdayaan masyarakat, aksis sosial dan pelayanan masyarakat	√	√	√			perempuan dan anak	
3	Memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak khususnya dalam masalah-masalah sosial	terwujudnya pendampingan kepada perempuan dan anak khususnya dalam masalah-masalah sosial	√	√	√			perempuan dan anak	
4	Mengadakan regulasi yang mendukung pelaksanaan PAUD di Nasyi'atul Aisyiyah	terwujudnya regulasi yang mendukung pelaksanaan PAUD	√	√	√			lembaga PAUD	
5	Membangun kesadaran dan sikap anti kekerasan terhadap keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia	terwujudnya kampanye anti kekerasan kepada masyarakat	√	√	√			masyarakat	
6	Mengembangkan model sosialisasi kesehatan reproduksi usia produktif dan remaja	terwujudnya kelompok peer group conselor untuk kesehatan reproduksi remaja	√	√	√			usia produktif dan remaja	
7	Meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan anak dan menjadi motor penggerak penjaga perkembangan dan kesehatan bayi, balita dan anak	membentuk komunitas parenting untuk bayi dan balita	√	√	√			masyarakat	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dinas Kelautan dan Perikanan									
1	Program gemar makan ikan bagi anak PAUD	terwujudnya kampanye gemar makan ikan	√	√	√	Dinas Kelautan dan Perikanan	APBD	anak PAUD	
2	Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah pantai (kawasan pantai ramah anak)	terwujudnya sosialisasi	√	√	√			Anak dan Tim SAR	
Kejaksaan Negeri									
1	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum	terwujudnya penanganan kasus hukum terhadap perempuan dan anak	√	√	√	Kejaksaan Negeri	Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Negara	Perempuan dan Anak	
	Kegiatan Pra Peununtutan, kegiatan penuntutan, upaya hukum dan eksekusi terhadap perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perkara yang berkaitan dengan anak								
2	kegiatan Penerangan (Penyuluhan Hukum) tentang Perkara Tindak Pidana Kekerasan terhadap perempuan dan anak	terwujudnya penyuluhan hukum	√	√	√			masyarakat, perempuan dan anak	
3	Mengirimkan Jaksa untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak serta ABH.	terwujudnya jaksa yang responsif hak anak	√	√	√	jaksa			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pendirian Kelompok Bermain, TPA, Taman Baca Al Qur'an	terwujudnya Kelompok Bermain, TPA, Taman Baca Al Qur'an	√	√	√	Pimpinan Daerah 'Aisyiyah	Swadaya Lembaga	lembaga	
2	Program Pengembangan TK / KB percontohan	terwujudnya Pengembangan TK / KB percontohan	√	√	√				
3	Program Mengembangkan Apresiasi Seni Budaya	terwujudnya apresiasi seni dan budaya	√	√	√			lembaga pendidikan, anak	
	Kegiatan Pendokumentasian lagu dolanan anak		√	√	√				
	Kegiatan Lomba dolanan anak		√	√	√				
	Kegiatan Lomba Kreatifitas Seni TK Aisyiyah		√	√	√				
4	Program Penerapan Keluarga Sakinah dan Qoriyah Toyyibah (desa percontohan di bidang kesehatan)	terwujudnya penyuluhan	√	√	√			keluarga, masyarakat	
	Kegiatan Penyuluhan tentang KB dan Kesehatan Reproduksi Sehat		√	√	√				
	Kegiatan Penyuluhan tentang gizi		√	√	√				
	Kegiatan Bantuan PMT untuk Posyandu Balita dan Posyandu Lansia		√	√	√				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Program Pelayanan kesehatan bagi balita, ibu dan lansia	terwujudnya pelayanan kesehatan	√	√	√	Pimpinan Daerah 'Aisyiyah	Swadaya Lembaga	balita ibu dan lansia	
	Kegiatan kerjasama dengan PKU Muh. Wonosari menyelenggarakan pelayanan pengobatan dalam pertemuan organisasi		√	√	√				
	Kegiatan bantuan untuk kegiatan tumbuh kembang balita bagi anak TK ABA di (DTKB APRAS)		√	√	√				
	Kegiatan penyuluhan tentang kesehatan bayi, ibu hamil dan nifas.		√	√	√				
6	Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi	terwujudnya penyuluhan kespro	√	√	√			siswa smp,mts, sma , smk muhammadiyah	
	Kegiatan Penyuluhan Kesehatan reproduksi bagi siswa SMP/MTs/SMA/SMK Muhammadiyah Gunungkidul		√	√	√				
7	Program Pelayanan Sosial	terwujudnya pelayanan sosial bagi anak	√	√	√			Anak yatim, anak keluarga tidak mampu, anak korban kleahiran tidak diinginkan	
	Kegiatan mencari orangtua asuh dan beasiswa anak yatim dan tidak mampu		√	√	√				
	kegiatan Menyediakan tempat penampungan anak korban kelahiran tidak diinginkan		√	√	√				

## BAB VI

### PENUTUP

Keseluruhan upaya untuk pemenuhan hak-hak anak dalam rangka mewujudkan Gunungkidul menuju Kabupaten Layak Anak, yang melibatkan berbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan anak menjadi generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya.

Kebijakan Bupati dalam rangka meningkatkan kualitas hidup anak ini juga dimaksudkan untuk ikut mendukung tercapainya visi, misi dan renstra yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2015, yaitu mewujudkan Gunungkidul yang lebih maju, makmur dan sejahtera.

Dukungan berbagai pihak, baik dari eksekutif, legislatif, yudikatif, Pemerintah Desa, masyarakat, dunia usaha, maupun organisasi non pemerintah, sangat diharapkan partisipasi dan kontribusinya untuk peduli dalam membantu memberikan perlindungan dan kesejahteraan, melalui upaya-upaya pemenuhan hak-hak anak secara berkesinambungan sesuai dengan bidang ketugasan masing-masing.

Selanjutnya, melalui kebijakan rencana aksi daerah menuju kabupaten Gunungkidul yang layak anak ini diharapkan mulai sejak tingkat Dusun, Desa sampai tingkat kabupaten, berkomitmen untuk mewujudkan lingkup wilayahnya masing-masing menjadi kawasan ramah anak dan layak anak. Sehingga akhirnya, dukungan dari lingkup wilayah masing-masing yang sudah ramah anak dan layak anak kemudian dapat menjadi Kabupaten Gunungkidul Layak Anak.

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

BADINGAH